

# Miranda dan Koordinasi Kebijakan

Oleh: Prof. Mudrajad Kuncoro, Ph.D\*

Sumber: <http://www.investorindonesia.com>

26/12/2007 21:20:15 WIB



## JAKARTA, Investor Daily

Koordinasi yang baik antara kebijakan moneter dan fiskal diharapkan membantu perekonomian Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian dan gejolak eksternal, seperti lonjakan harga minyak mentah dunia atau kasus kredit macet sektor perumahan di Amerika Serikat (*sub-prime mortgage*).

Tantangan ke depan makin berat karena koordinasi moneter dan fiskal harus senantiasa diupayakan secara konsisten dengan memperhatikan kapasitas ekonomi dan skala prioritas. Koordinasi perlu diletakkan dalam dimensi kebijakan makroekonomi yang terintegrasi, dilandasi semangat *striking the optimal balance*.

Itulah cuplikan butir pemikiran Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia Prof Miranda Swaray Goeltom, saat dikukuhkan sebagai Guru Besar Tetap Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI), Sabtu 15 Desember 2007. Miranda menyampaikan orasi berjudul *Koordinasi Kebijakan Moneter dan Fiskal: Tantangan dan Strategi Pemeliharaan Stabilitas Makro dan Pertumbuhan Ekonomi untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat*.

Mendengarkan pidato pengukuhan guru besar tetap FE UI ke-11 dan membaca buku karya terbarunya, *Essays in Macroeconomic Policy: The Indonesian Experience*, sungguh menarik dan melegakan bagi saya. Pasalnya, koordinasi di negeri ini merupakan 'barang mewah'.

Betapa tidak. Banyak pejabat, baik pusat maupun daerah, terjebak dalam *strategic myopia*.

Mereka seolah melihat dengan 'kaca mata kuda', hanya mementingkan departemen, dinas, dan daerahnya sendiri, tanpa peduli departemen, dinas, dan daerah lain. Tidak akan ada koordinasi sepanjang yang ada di benak para pengambil keputusan ini adalah berkurangnya jatah anggaran dan proyeknya masing-masing.

Harus diakui, pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla (SBY-JK), ketidakstabilan makroekonomi dan ketidakpastian kebijakan ekonomi makro sudah jauh menurun dibanding masa lalu. Setidaknya, ini tercermin dari survei Bank Dunia maupun LPEM FEUI selama tiga tahun terakhir.

Angka-angka indikator makro ekonomi pun boleh dikata berada dalam kondisi 'aman dan terkendali'. Ini terlihat setidaknya dari rata-rata indikator makro utama selama 2005-2007 berikut: angka pertumbuhan

ekonomi yang tumbuh 5,7%, inflasi 10%, suku bunga SBI 9,9%, dan kurs Rp 9.343 per dolar AS.

Pasar modal diwarnai oleh rekor-rekor baru indeks harga saham gabungan (IHSG), surat utang negara (SUN), yang terus diminati oleh investor domestik maupun asing, serta obligasi Republik Indonesia (ORI) yang selalu terserap oleh investor perseorangan dengan nilai melebihi target.

Perbaikan kinerja neraca pembayaran bermuara pada peningkatan cadangan devisa yang cukup signifikan: posisi cadangan devisa pada akhir 2006 sebesar US\$ 34,7 miliar, naik menjadi US\$ 55,1 miliar pada 7 Desember 2007.

Rekor makro ekonomi bukannya tanpa perjuangan. Miranda mengatakan bahwa indahnya koordinasi kebijakan moneter dan fiskal akan sangat tampak ketika ekonomi Indonesia menghadapi ketidakpastian dan gejolak eksternal, seperti lonjakan harga minyak atau nilai tukar.

Miranda menawarkan model koordinasi *leader-follower*. Artinya, koordinasi harus mengacu kepada urutan (*sequence*) tindakan kebijakan. Salah satu otoritas harus melahirkan kebijakan terlebih dulu berdasarkan tantangan lingkungan eksternal, baru direspons oleh otoritas kebijakan lainnya.

Ketika terjadi lonjakan harga minyak, otoritas fiskal perlu mengubah kebijakan pengeluaran pemerintah dengan segera, sedang otoritas moneter perlu menjadi *follower* dengan melakukan kebijakan moneter yang seharusnya tidak mengganggu stabilitas makroekonomi.

Sebaliknya, di tengah gejolak kurs, otoritas moneter perlu menjadi *leader* dengan membuat berbagai upaya dalam melakukan intervensi langsung di pasar valas dan obligasi, sedangkan otoritas fiskal menjadi *follower*, dengan mempersiapkan jaring pengaman dan mengurangi dampak lanjutan dari risiko sistemik di sektor finansial.

Hanya saja, sekarang ini dibutuhkan tidak hanya *policy mix* makro (baca: fiskal dan moneter), namun koordinasi kebijakan pada lingkungan metaekonomi. Lingkungan meta ini mencakup antisipasi terhadap *natural disruption*, sektoral, dan daerah.

Berbagai bencana datang silih berganti merupakan *natural disruption* sejak 2004 yang harus diantisipasi. Dari tsunami yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan pantai selatan Jawa, gempa bumi yang melanda Jogja dan berbagai daerah, banjir, gunung meletus, longsor, lumpur panas di Sidoarjo menambah deret panjang kejadian yang tidak dapat diprediksi dan menimbulkan dampak negatif bagi industri di daerah tersebut, serta meningkatkan ketidakpastian iklim berusaha.

Koordinasi lintas sektor dan daerah amat dibutuhkan karena pola perencanaan Indonesia bersifat sektoral dan melibatkan 465 kabupaten/kota serta 33 provinsi. Ibarat lagu, lagu yang dimainkan berbagai macam. Ada keroncong, rock, jazz, gamelan, dan dangdut, dengan pemain dan penonton berbeda. Inilah pentingnya 'sang pemimpin' menjadi dirigen suatu orkestra kebijakan makro, sektoral, dan daerah.

Usulan kebijakan menarik yang dilontarkan Prof Miranda adalah: pertama, otoritas fiskal dan moneter juga perlu merintis sebuah *contingency plan* (rencana darurat) dengan tujuan utama menjamin keuntungan perekonomian yang sudah diraih, tidak serta merta hilang seperti terjadi pada krisis 1997-1998.

Kedua, mendirikan lembaga yang menangani dana-dana yang berasal dari sisi penerimaan pemerintah, misalnya dari penerimaan terhadap komoditas minyak. Lembaga itu dinamakan *Sovereign Wealth Fund* (SWF), dengan tujuan utama mempersiapkan dana stabilisasi saat muncul gejolak ekonomi.

SWF bertujuan mengoptimalkan dana negara dengan menempatkannya dalam berbagai instrumen investasi yang risikonya sudah diperhitungkan. SWF adalah lembaga independen, yang tidak bergantung pada keputusan politik melainkan keputusan komersial semata sesuai kemampuan manajemen dana itu.

Miranda menambahkan, bila tidak terjadi gejolak ekonomi maka SWF dapat difungsikan sebagai tabungan negara. Bila dana dalam SWF dirasa mencukupi, dapat pula digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, misalnya untuk perbaikan sarana pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur jalan.

Nah, sisa waktu dua tahun mendatang bagi pemerintahan SBY-JK perlu meningkatkan koordinasi kebijakan pada level meta, makro, dan daerah. Semoga koordinasi dan implementasi kebijakan tidak lagi menjadi barang mewah di negeri ini

\*) Guru Besar dan Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.